

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik apabila GDP riil negara tersebut meningkat, dan kemudian hal ini dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi. Indonesia merupakan negara yang juga menggunakan teori ini untuk mengukur pertumbuhan ekonomi (Huda 2015:8). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara. Ukuran ini menitikberatkan perhatiannya pada kenaikan PDB (Produk Domestik Bruto). Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang, dari periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat (Sukirno, 2005). Pembangunan ekonomi pada masa ekonomi tradisional hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan PDB, baik secara keseluruhan maupun perkapita. Peningkatan PDB ini selanjutnya diharapkan akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lebih merata. Prinsip tersebut dikenal dengan *trickle down effect* (Todaro, 2000).

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Salah satu peran perencanaan adalah sebagai arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan. Sedangkan pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah.

Todaro dan Smith (2003: 269) mengemukakan bahwa teori pertumbuhan moderen menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) melalui pendidikan dalam rangka mendorong dan meningkatkan produktivitas dimana pertumbuhan produktivitas tersebut pada gilirannya merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi, modal manusia dalam terminologi ekonomi digunakan untuk bidang pendidikan dan berbagai kapasitas manusia lainnya yang ketika bertambah dapat meningkatkan produktivitas, karena pendidikan memainkan kunci dalam kemajuan perekonomian di suatu negara. Pendidikan merupakan alat untuk mengadopsi teknologi modern sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian, pendidikan juga merupakan komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan sebagai input bagi fungsi produksi agregat.

Hidup layak merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Konstitusi Indonesia UUD'45, secara eksplisit mengakui hal itu dengan mengamanatkan bahwa tugas pokok pemerintah Republik Indonesia adalah "memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Hal itu berarti, hidup bebas dari kemiskinan atau menikmati kehidupan yang layak merupakan

hak asasi setiap warga negara adalah tugas pemerintah untuk menjamin terwujudnya hal itu. Pembangunan nasional pada dasarnya ialah meningkatkan kesejahteraan umum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan (Sukmaraga 2011:1).

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrument pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin. (Simatupang dan Saktyanu 2003).

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya *part-time* selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sehingga Arsyad (1997) menyatakan bahwa ada

hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal standar hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut *World Bank*, salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Disamping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasa mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan sebagai suatu kondisi serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomis, berimplikasi jamak kepada kehidupan seseorang atau suatu masyarakat. Oleh karena itu kegiatan pembangunan yang diselenggarakan di berbagai negara pada hakikatnya dimaksudkan antara lain untuk mengentaskan masyarakatnya dari kemiskinan.

kemiskinan Menurut (Sulistyanto, 2010) merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun seringkali tidak disadari

kehadirannya sebagai masalah untuk oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana mereka hidup dalam kemiskinan. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan dengan masalah kemiskinan (Saputra: 2011).

Pada hakekatnya pembangunan daerah di anjurkan tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut. Menurut Esmara dalam ilmu ekonomi dikemukakan berbagai teori yang membahas tentang bagaimana ekonomi harus di tangani untuk mengejar keterblakangan, Tisna (dalam Syahrullah 2014:7).

Hal ini menunjukkan bahwa upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu tujuan dari perencanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang tidak dapat dihindari oleh si miskin. Pertumbuhan ekonomi, pendidikan yang terlampau rendah, keterbatasan sumber alam, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan modal, dan beban keluarga, kesemua faktor tersebut merupakan vicious circle (lingkaran setan) dalam masalah timbulnya kemiskinan (Wirawan, 2015: 547).

Untuk melihat pola pertumbuhan produk domestik regional bruto, tingkat pendidikan yang di ukur dari angka partisipasi kasar, persentase peningkatan pengangguran, serta persentasi peningkatan kemiskinan di kota ternate.

Tabel 1.1. PDRB dengan jumlah Jutaan Rupiah, APK (Angka Partisipasi Kasar), TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Ternate Periode Tahun 2011 - .2020

Tahun	PDRB	APK	TPT	PPM
2011	3 881 911,30	289,8	4,01	2,67
2012	4 232 645,00	300,62	7,71	2,73
2013	4 557 416,40	292,19	4,73	3,24
2014	4 956 479,80	295,96	8,72	3,16
2015	5 357 318,20	308,19	6,87	2,99
2016	5 785 434,40	289,8	4,01	2,67
2017	6 222 307,40	300,62	7,71	2,73
2018	6 735 006,00	288,41	5,91	3,00
2019	7 290 392,30	249,72	6,06	3,14
2020	7 225 782,1	648,48	5,80	3,46

Sumber: A. Badan Pusat Statistik Kota Ternate

Jika kita lihat pada tabel 1.1. diatas data publikasi dari Badan Pusat Statistkik kota ternate, nilai PDRB dari tiap tahunnya mengalami kenaikan di 3 tahun terakhir yaitu mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Disitu terlihat PDRB Kota Ternate 2017 mengalami kenaikan sebesar 6.222.307,40 dari tahun sebelumnya yaitu 5.785.434,40 di tahun 2016. Kenaikan PDRB ini sangat diharapkan dapat berpengaruh positif untuk mengurangi tingkat presentasi kemiskinan di Kota Ternate.

Dipendidikan, penelitian ini menggunakan data Angka Partisipasi Kasar, data di atas menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dari tahun 2016 samapai 2019, dimana terlihat di tahun 2016 terlihat angka 289.8 mengalami penurunan, kemudian mengalami kenaikan dengan angka 300,62 ditahun 2017 dan pada tahun 2018 angka pertisipasi kasar

ini mengalami penurunan. Berbeda dengan PDRB tiap tahunnya mengalami peningkatan dan tidak ada angka penurunan.

Data pengangguran juga terlihat pada tabel diatas mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, di tahun 2016 dimana presentasi tingkat pengangguran terbuka sebesar 4.01 dan naik pada tahun 2017 dengan angka 7,71 persen, kemudian turun lagi pada tahun 2018 dengan angka 5,91 dan naik lagi pada tahun setelahnya.

Pendekatan Pembangunan tradisional lebih difokuskan pada peningkatan Produk Domestik regional bruto suatu wilayah, laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak serta merta diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto semata akan tetapi juga harus memperhatikan pemerataan dalam pendistribusian pendapatan. Sehingga menurunnya Produk Domestik Regional Bruto dapat berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Apabila tingkat pendapatan masyarakat menurun maka rumah tangga juga akan menurunkan standar konsumsi mereka.

Sehingga pemerintah mempunyai tugas yang sangat besar untuk menyelesaikan problematika tersebut, pemerintah harus mengupayakan dalam hal menangani pendidikan, pengangguran dan kemiskinan dengan pemanfaatan sumberdaya yang efisien. Agar terciptanya lapangan kerja, pengangguran menurun, pendapatan meningkat dan kemiskinan rendah.

Upaya menurunkan tingkat kemiskinan merupakan hal yang penting, hal ini bisa dibarengi dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran. Menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin, sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan juga rendah.

Sudah dijelaskan sebelumnya tentang permasalahan diatas sehingga penulis tertarik dengan masalah tersebut dan mencoba mengkaji lebih dalam lagi. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan Judul **“pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, Pengangguran, Terhadap Kemiskinan di Kota Ternate.”**

1.2. Rumusan Masalah

Tantangan terbesar dalam suatu negara yang berkembang yaitu upaya mengurangi tingginya tingkat kemiskinan di negaranya, karenakan faktor tersebut dapat menimbulkan masalah ekonomi maupun sosial. Dalam hal mengatasi kemiskinan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu daerah. Kota ternate merupakan daerah yang mempunyai pendapatan yang cukup besar, namun data kemiskinannya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dari sinilah diperlukan adanya penelitian kembali untuk menganalisis masalah kemiskinan di Kota ternate.

Diharapkan faktor – faktor seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan dan Pengangguran dapat mengurangi angka kemiskinan di Kota Ternate.

Untuk itu penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaruh variable Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Kota Ternate.
2. Bagaimana pengaruh variabel pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Ternate.

3. Bagaimana pengaruh variabel pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kota Ternate.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Ternate.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan di Kota Ternate.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di peroleh dalam penilitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memperoleh pengetahuan terkait pengaruh produk domestik regional bruto, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kota Ternate.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran untuk pemerintah daerah setempat pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan untuk meninjau persoalan pengaruh pendapatan domestik regional bruto, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kota ternate.

3. Manfaat Akademis

Dapat menjadi sebuah tolak ukur untuk pemenuhan suatu syarat bagi penulis agar layak memperoleh gelar strata satu, dan di harapkan dapat memberi kontribusi ilmiah kepada setiap mahasiswa tentang pengaruh Produk Domestik

Regional Bruto, pendidikan, dan pengangguran terhadap Kemiskinan di Kota Ternate.